SELAYANG PANDANG
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dari Disparbud menuju Dinas Pariwisata: Menyongsong Kutai Kartanegara sebagai Destinasi Unggulan Kalimantan Timur

KATA PENGANTAR

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan wilayah dengan akar sejarah yang panjang, sebagai kelanjutan dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan bertetangga historis dengan jejak Kerajaan Kutai Martadipura di Muara Kaman, salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Kekayaan sejarah, adat, dan alam inilah yang menjadi modal dasar berkembangnya urusan kepariwisataan di daerah ini, hingga akhirnya diwadahi secara khusus dalam sebuah perangkat daerah yang kini dikenal sebagai Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumen selayang pandang ini disusun untuk memberikan gambaran ringkas mengenai konteks sejarah kewilayahan, kronologi kelembagaan, kedudukan, tugas dan fungsi, hingga capaian serta arah pengembangan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dari masa ke masa, sebagai bahan literasi kedinasan maupun publikasi umum.

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di Provinsi Kalimantan Timur, dengan Tenggarong sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten ini dikenal luas sebagai daerah yang menyimpan kekayaan sejarah, budaya, dan sumber daya alam, sekaligus tumbuh menjadi salah satu daerah otonom dengan sektor pariwisata yang terus dikembangkan sebagai salah satu pilar perekonomian daerah di luar sektor pertambangan dan perkebunan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari dinamika penataan kelembagaan perangkat daerah di tingkat nasional maupun daerah. Sebagaimana lazim terjadi di banyak kabupaten/kota di Indonesia, urusan pariwisata pada mulanya dikelola bersama-sama dengan urusan kebudayaan dalam satu wadah organisasi, sebelum akhirnya dipisahkan menjadi perangkat daerah tersendiri seiring dengan penyesuaian terhadap kebijakan penataan organisasi perangkat daerah secara nasional.

II. LATAR BELAKANG SEJARAH DAN POTENSI KEPARIWISATAAN KUTAI KARTANEGARA

Secara historis, wilayah Kutai Kartanegara memiliki keterkaitan erat dengan dua entitas kerajaan besar. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai Martadipura di Muara Kaman, yang diyakini berdiri sekitar abad ke-4 Masehi dan dicatat sebagai salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia, dengan bukti berupa prasasti Yupa berhuruf Pallawa. Yang kedua

adalah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, yang lahir dari penyatuan Kerajaan Kutai Martadipura dengan Kerajaan Kutai Kartanegara sekitar abad ke-17, dan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari kesultanan tersebut.

Warisan sejarah, tradisi adat seperti upacara Erau, keragaman suku (Kutai, Dayak, Banjar, Bugis, Jawa, dan lain-lain), serta kekayaan alam mulai dari sungai Mahakam, kawasan konservasi, hingga situs budaya, menjadi modal utama yang mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengelola sektor pariwisata secara lebih serius dan terlembaga.

III. SEJARAH KELEMBAGAAN

A. Masa Penyatuan Urusan Kebudayaan dan Pariwisata (Disparbud)

Sebelum berdiri sendiri, urusan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara pada mulanya diselenggarakan dalam satu wadah bersama urusan kebudayaan, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dikenal luas dengan sebutan Disparbud. Cikal bakal penyelenggaraan urusan pariwisata di daerah ini diyakini telah dirintis sejak sekitar tahun 1991 dalam bentuk Badan Pariwisata Daerah, sejalan dengan pola nasional pembentukan lembaga pariwisata daerah pada awal dekade 1990-an; namun demikian, dokumen hukum yang secara eksplisit mencatat pembentukan badan tersebut belum berhasil ditelusuri secara daring, sehingga informasi ini disampaikan sebagai catatan sejarah kelembagaan yang masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari arsip resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keberadaan Disparbud pada periode berikutnya antara lain diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta dipertegas melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Disparbud pada masa itu memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan sekaligus pariwisata, meliputi perumusan kebijakan pariwisata, kesenian, kebudayaan, dan perfilman, pelayanan perizinan usaha pariwisata, pembinaan pelaku pariwisata dan budaya, hingga koordinasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkup kebudayaan dan pariwisata.

B. Pemisahan dan Pembentukan Dinas Pariwisata (2016)

Momentum penting dalam sejarah kelembagaan kepariwisataan Kutai Kartanegara terjadi pada tahun 2016, seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di tingkat nasional, yang mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia menata ulang susunan organisasi perangkat daerahnya, termasuk nomenklatur dinas yang membidangi pariwisata.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui Perda ini, urusan kebudayaan yang semula bergabung dengan pariwisata dialihkan dan disatukan dengan urusan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016), sementara urusan pariwisata berdiri sendiri sebagai perangkat daerah baru dengan nomenklatur Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada tahun yang sama, komitmen daerah terhadap pembangunan kepariwisataan turut dikuatkan melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara (RIPPARKAB) Tahun 2016–2025, yang menjadi pedoman arah pengembangan destinasi, industri, kelembagaan, dan pemasaran pariwisata daerah untuk sepuluh tahun ke depan.

C. Penataan Kelembagaan Lanjutan (2017–2024)

Pasca pembentukannya, susunan perangkat daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara—termasuk Dinas Pariwisata—terus disesuaikan mengikuti dinamika kebutuhan organisasi dan regulasi yang berlaku, antara lain melalui:

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata, sebagai penyesuaian struktur organisasi internal Dinas;
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, yang turut menyesuaikan pengaturan sejumlah perangkat daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, yang menjadi dasar hukum struktur organisasi Dinas Pariwisata hingga saat ini, termasuk pengaturan kelompok jabatan fungsional (struktur organisasi terkini disajikan pada Lampiran); dan
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rangkaian regulasi tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami penyempurnaan, sejalan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

IV. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN STRUKTUR ORGANISASI SAAT INI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, yang meliputi antara lain penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Secara organisatoris, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara membawahi sekretariat serta beberapa bidang teknis, salah satunya Bidang Pemasaran Pariwisata yang menangani promosi destinasi, pengelolaan media dan konten pariwisata, serta kerja sama pemasaran—bidang yang di antaranya menaungi pelaksanaan kegiatan procurement, manajemen risiko (SPIP/Manrisk), dan administrasi acara promosi pariwisata sehari-hari. Bagan struktur organisasi lengkap beserta daftar personalia per Agustus 2026 disajikan pada Lampiran dokumen ini.

Saat ini, kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara berlokasi di Gedung D, Kompleks Perkantoran Bupati, Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

V. LAYANAN DIGITAL DAN MEDIA PROMOSI PARIWISATA

Sejalan dengan transformasi digital pemerintahan, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengembangkan sejumlah kanal layanan dan promosi berbasis digital, di antaranya:

- Website resmi Dinas Pariwisata (dispar.kukarkab.go.id) sebagai portal informasi profil, berita, agenda, dan layanan kedinasan;
- Visiting Kukar (visiting.kukarkab.go.id), portal promosi destinasi dan atraksi wisata unggulan daerah;
- Satu Data Pariwisata (datapariwisata.kukarkab.go.id), portal data dan statistik kepariwisataan yang terintegrasi;
- Kanal media sosial resmi "Visiting Kutai Kartanegara" pada Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok, yang aktif mempromosikan destinasi seperti Pulau Kumala, Museum Kayu Tuah Himba, Planetarium Jagad Raya, Bukit Bangkirai, hingga kawasan konservasi orangutan di Samboja.

Kehadiran layanan digital ini merupakan bagian dari upaya Dinas Pariwisata dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik, sebagaimana juga tercermin dari kepatuhan Dinas terhadap kewajiban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

VI. CAPAIAN DAN ARAH PENGEMBANGAN KE DEPAN

Dalam perjalanannya, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara secara berkala menyusun dokumen perencanaan strategis sebagai pedoman kerja, di antaranya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Tahun 2021–2026 dan yang terbaru Renstra Tahun 2025–2029, serta Rencana Kerja (Renja) tahunan. Dinas juga secara rutin menerbitkan data statistik kepariwisataan, data kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta data pelaku ekonomi kreatif di 17 subsektor ekonomi kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ke depan, arah pengembangan kepariwisataan Kutai Kartanegara diselaraskan dengan visi peningkatan potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, melalui penguatan destinasi unggulan, digitalisasi layanan kepariwisataan, kerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra strategis, serta pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

VII. PENUTUP

Perjalanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara—dari cikal bakalnya sebagai Badan Pariwisata Daerah, masa penyatuannya dengan urusan kebudayaan dalam Disparbud, hingga berdiri sebagai perangkat daerah tersendiri sejak tahun 2016 dan terus disempurnakan kelembagaannya hingga saat ini—mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor strategis pembangunan daerah. Dokumen selayang pandang ini diharapkan dapat menjadi bahan literasi kedinasan sekaligus wawasan bagi masyarakat luas mengenai sejarah dan perkembangan kelembagaan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

DASAR HUKUM DAN SUMBER REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, beserta perubahannya (Perda Nomor 6 Tahun 2017, Perda Nomor 3 Tahun 2022, dan Perda Nomor 13 Tahun 2024).
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016–2025.
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2021 dan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.
8. Laman resmi PPID Kabupaten Kutai Kartanegara, ppid.kukarkab.go.id (profil OPD, profil Pemkab, dan produk hukum terkait).
9. Laman resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, dispar.kukarkab.go.id.
10. Laman Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kukar, prokom.kukarkab.go.id (sejarah kewilayahan Kutai Kartanegara).
11. Portal peraturan.bpk.go.id (JDIH BPK RI) untuk penelusuran nomor dan judul produk hukum daerah.